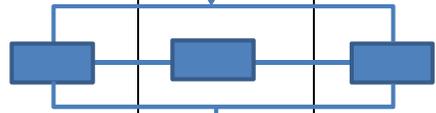
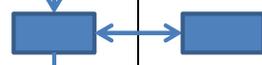
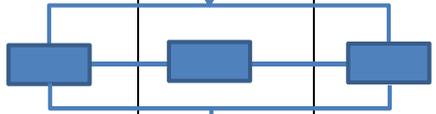
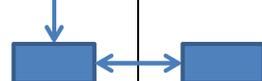


 <b>KEMENTERIAN KOORDINATOR          BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN          REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>Sekretariat Kementerian Koordinator</b>  <b>Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan</b>	Nomor SOP	OT.01.02-022-079.Set.KumSidhal
	Tanggal Pembuatan	Senin, 17 Juli 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke .....
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan   Sidiq Mustofa, S.E., M.M. NRP. 9582/P
<b>Judul SOP Mikro</b>		<b>Pemberian Advokasi Hukum dengan Pengacara</b>

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam</li> <li>Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Kemenko Polhukam</li> <li>Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2016 tentang JDIH Kemenko Polhukam</li> <li>Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kemenko Polhukam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengetahuan terkait proses pemberian bantuan hukum</li> <li>Mempunyai pengalaman sebagai <i>problem solver</i></li> <li>Menguasai <i>legal drafting</i></li> <li>Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office</li> <li>Memiliki kemampuan presentasi</li> <li>Memiliki kecermatan dan ketelitian</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Makro Pemberian Advokasi Hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi</li> <li>Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)</li> <li>Mesin Fotokopi</li> <li>Telepon, Faksimile, dsb</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan :</b>
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pemberian bantuan hukum bagi para pejabat/pegawai di Kemenko Polhukam	Daftar inventarisasi penanganan bantuan hukum

**SOP Mikro Pemberian Advokasi Hukum dengan Pengacara**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kabag Hukum	Kasubbag PPH dan PAH	Pelaksana (JFT/JP)	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kasubbag PPH dan PAH untuk memberikan advokasi hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi pemohon					surat/naskah dinas permintaan advokasi hukum	15 Menit	disposisi	
2	Meneliti dan mempelajari bahan dan data pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum serta berkoordinasi dengan pemohon serta melakukan analisis apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan					disposisi	1 Hari	Bahan dan data pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum + disposisi	
3	Melakukan pertemuan dengan pemohon untuk membahas pemilihan konsultan hukum/pengacara (pemohon menyerahkan pilihan atau memilih sendiri konsultan hukumnya)					Bahan dan data pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum + disposisi	120 Menit	Kesepakatan	
4	Mencari konsultan hukum/pengacara dan menyusun daftar konsultan hukum/pengacara tersebut					Kesepakatan	tentatif	Daftar konsultan hukum/pengacara	
5	Melakukan pertemuan dengan pemohon untuk memilih daftar konsultan hukum/pengacara					Daftar konsultan hukum/pengacara	120 Menit	Kesepakatan	
6	Mendampingi pengacara dan pemohon dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporannya					Kesepakatan	tentatif	Pendampingan hukum	
7	Menyusun konsep laporan pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum, kemudian menyampaikannya kepada Kasubbag PPH dan PAH					Pendampingan hukum	120 Menit	Konsep laporan pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum	
8	Memeriksa konsep laporan pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum, kemudian menyampaikannya kepada Kabag Hukum					Konsep laporan pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum	30 Menit	Konsep laporan pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum telah diperiksa Kasubbag	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kabag Hukum	Kasubbag PPH dan PAH	Pelaksana (JFT/JP)	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Menerima bahan dan data pemberian pendampingan hukum beserta laporannya untuk dijadikan data dukung terkait proses pemberian advokasi					Konsep laporan pemberian advokasi hukum atas permasalahan hukum telah diperiksa Kasubbag	15 Menit	dokumen proses pemberian advokasi hukum	